



**Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat**



DIAGRAM CROSSCUTTING TAHUN 2025



Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa



dinas.pupr.lambare@gmail.com



pupr_lampungbarat

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan *Crosscutting* Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, khususnya dalam menilai keterkaitan, sinergi, dan kontribusi lintas sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026.

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat memiliki karakteristik lintas sektor (*crosscutting*), karena hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PUPR tidak hanya berdampak pada sektor infrastruktur, tetapi juga berperan sebagai prasyarat dan pendukung utama bagi sektor lain, seperti pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan bencana. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mampu menggambarkan keterkaitan kinerja antar perangkat daerah secara komprehensif dan terintegrasi.

Laporan *crosscutting* kinerja ini disusun dengan mengacu pada RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026, Rencana Strategis Dinas PUPR Tahun 2023–2026, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam pelaksanaan evaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sekaligus sebagai dasar penguatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program lintas perangkat daerah.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Kabupaten Lampung Barat yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Liwa, Februari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



MIA MIRANDA, S.T

Pembina Tk.I

NIP. 19720905 200212 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada masa transisi kepemimpinan kepala daerah. RPD tersebut menekankan pentingnya keterpaduan, sinergi, dan konsistensi antar perangkat daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Barat sebagai perangkat daerah teknis memiliki peran strategis dalam penyediaan infrastruktur dasar, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pengelolaan sumber daya air, serta urusan pertanahan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut memiliki karakteristik lintas sektor (*crosscutting*), karena hasil kinerja Dinas PUPR menjadi prasyarat dan pendukung bagi pencapaian kinerja perangkat daerah lainnya.

Program dan kegiatan Dinas PUPR tidak hanya berorientasi pada pemenuhan output fisik, tetapi juga berkontribusi terhadap capaian *outcome* pembangunan daerah, seperti peningkatan konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan terhadap bencana. Oleh karena itu, kinerja Dinas PUPR perlu dianalisis tidak secara sektoral semata, melainkan dalam kerangka keterkaitan dan kontribusi lintas perangkat daerah.

Dalam rangka mendukung prinsip akuntabilitas kinerja serta pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diperlukan suatu laporan yang mampu menggambarkan hubungan logis antara perencanaan, pelaksanaan program, dan kontribusi hasil kinerja Dinas PUPR terhadap sasaran pembangunan daerah. Laporan *Crosscutting* Kinerja ini disusun sebagai instrumen analisis tersebut, sekaligus sebagai bahan pendukung evaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Laporan *Crosscutting* Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 adalah untuk memberikan gambaran keterkaitan dan kontribusi kinerja Dinas PUPR terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lintas sektor sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengidentifikasi peran dan kontribusi Dinas PUPR dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah lintas perangkat daerah.
2. Menunjukkan keterkaitan program dan kegiatan Dinas PUPR dengan program perangkat daerah lain dalam kerangka RPD 2023–2026.
3. Mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui analisis *crosscutting*.
4. Menjadi bahan pendukung evaluasi kinerja oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan *Crosscutting* Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
6. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026.
7. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026.

1.4 Ruang Lingkup Laporan

Ruang lingkup Laporan *Crosscutting* Kinerja ini meliputi:

1. Analisis peran dan kontribusi Dinas PUPR terhadap sasaran pembangunan daerah dalam RPD 2023–2026.
2. Pemetaan keterkaitan program dan kegiatan Dinas PUPR dengan perangkat daerah lain.
3. Penyajian matriks *crosscutting* kinerja antar perangkat daerah.
4. Identifikasi tantangan dan penguatan sinergi lintas sektor

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan *Crosscutting* Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I Pendahuluan**
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.
- **BAB II Gambaran Umum dan Peran Strategis Dinas PUPR**
Menguraikan kedudukan, tugas dan fungsi, serta peran Dinas PUPR dalam RPD 2023–2026.
- **BAB III Analisis *Crosscutting* Kinerja Antar Perangkat Daerah**
Menyajikan analisis keterkaitan dan kontribusi lintas sektor serta matriks *crosscutting* kinerja.
- **BAB IV Tantangan dan Penguatan Sinergi Lintas Sektor**
Menguraikan permasalahan, tantangan, dan upaya penguatan koordinasi antar perangkat daerah.
- **BAB V Penutup**
Memuat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN PERAN STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan kewenangan daerah. Keberadaan Dinas PUPR berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026, Dinas PUPR mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan kewenangan daerah;
3. Penyelenggaraan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur meliputi jalan dan jembatan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sanitasi, drainase, perumahan, dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan teknis terhadap pemanfaatan ruang serta penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dinas yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan tata usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tugas dan fungsi tersebut menunjukkan bahwa Dinas PUPR tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam pengendalian pembangunan, pemanfaatan ruang, serta pencapaian sasaran pembangunan daerah secara lintas sektor.

2.2 Peran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026, pembangunan infrastruktur ditempatkan sebagai salah satu faktor utama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Barat memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah teknis yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur dasar daerah.

Peran strategis Dinas PUPR tercermin dari kedudukannya sebagai **sektor inti (Core Sector)** dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dimana output dan *outcome* program serta kegiatan yang dilaksanakan menjadi prasyarat bagi pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor. Infrastruktur yang disediakan oleh Dinas PUPR menjadi fondasi bagi berjalannya aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Barat.

Secara lebih rinci, peran strategis Dinas PUPR dalam mendukung pelaksanaan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 meliputi:

1. **Mendukung peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah**
Dinas PUPR berperan dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan guna membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas penduduk, serta mendukung distribusi barang dan jasa. Peran ini berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
2. **Mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air**
Melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi serta pengendalian daya rusak air, Dinas PUPR berperan dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan mengurangi risiko kerusakan lahan akibat banjir maupun kekeringan.
3. **Mendukung peningkatan kualitas permukiman dan pelayanan dasar**
Penyediaan infrastruktur perumahan, air minum, sanitasi, dan drainase oleh Dinas PUPR berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kawasan kumuh, serta perbaikan kesehatan lingkungan.
4. **Mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan kebencanaan**
Dalam kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang rawan bencana, Dinas PUPR berperan dalam penyediaan infrastruktur pengendali risiko, penataan ruang sesuai daya dukung lingkungan, serta pengendalian pemanfaatan ruang guna mengurangi potensi dampak bencana.
5. **Mendukung tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum pembangunan**
Melalui penataan ruang dan pengelolaan pertanahan sesuai kewenangan daerah, Dinas PUPR berperan dalam memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang, mendukung tertib administrasi aset daerah, serta menciptakan iklim pembangunan yang terencana dan terkendali.

Peran strategis tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat pada periode 2023–2026 sangat dipengaruhi oleh kinerja Dinas PUPR, baik secara langsung maupun melalui kontribusinya terhadap

pencapaian kinerja perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, analisis kinerja Dinas PUPR perlu dilakukan dalam kerangka keterkaitan lintas sektor (*crosscutting*) guna memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kontribusi perangkat daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2.3 Keterkaitan Program Dinas PUPR dengan Sasaran RPD

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas PUPR tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pencapaian tujuan lintas sektor.

Program Dinas PUPR mencakup kegiatan yang mendukung sasaran RPD dalam berbagai bidang, seperti pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas permukiman, serta ketahanan terhadap bencana. Adapun keterkaitan program Dinas PUPR dengan sasaran RPD adalah sebagai berikut

Program Dinas PUPR	Sasaran RPD	Kontribusi Terhadap Pencapaian Sasaran
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, dan jasa, mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatkan hasil pertanian melalui pengelolaan irigasi yang efisien.
Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sehat.
Pengelolaan Sistem Drainase dan Air Limbah	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Kawasan Kumuh	Mengurangi risiko banjir dan pencemaran, meningkatkan kualitas permukiman.
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Permukiman	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan peningkatan kualitas permukiman.
Penataan Ruang dan Pertanahan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Menjamin kepastian hukum pemanfaatan ruang dan pengelolaan aset daerah.

BAB III

ANALISIS *CROSSCUTTING* KINERJA ANTAR PERANGKAT DAERAH

3.1 Pendahuluan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026, keterkaitan antar perangkat daerah perlu dianalisis untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Barat, sebagai sektor inti dalam pembangunan infrastruktur, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian sasaran lintas sektor yang tertera dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Pada bab ini, akan dianalisis bagaimana Dinas PUPR, melalui berbagai programnya, dapat berkontribusi langsung terhadap sasaran pembangunan lintas sektor yang dijalankan oleh perangkat daerah lain. Selain itu, akan diidentifikasi pula potensi penguatan sinergi antara Dinas PUPR dengan perangkat daerah lainnya, untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang lebih holistik dan terintegrasi.

3.2 Matriks *Crosscutting* Kinerja Antar Perangkat Daerah

Tabel di bawah ini menggambarkan keterkaitan antara program Dinas PUPR dengan program perangkat daerah lain. Analisis ini mengacu pada sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat 2023–2026, dan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana program-program Dinas PUPR mendukung program perangkat daerah lain dalam mencapai tujuan pembangunan lintas sektor.

Sasaran RPD Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

Diagram Grafis Crosscutting
Sasaran: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman

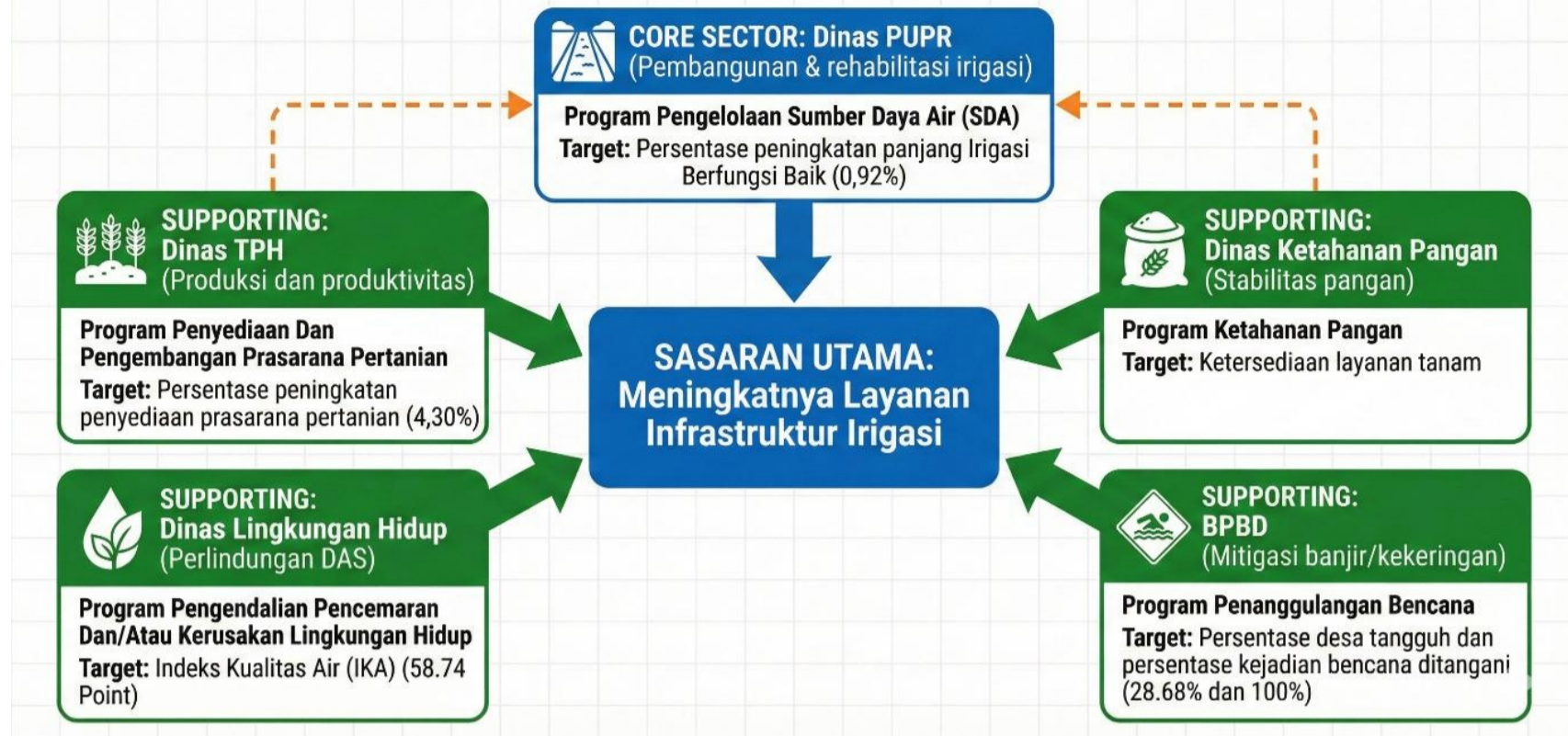


Sasaran Dinas PUPR Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan

OPD	Peran dalam RPD	Bentuk Peran & Dukungan	Program/Kegiatan	Target	Nilai Crosscutting
Dinas PUPR	Core Sector	Penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan		Output PUPR menjadi prasyarat kinerja OPD lain
Dinas Perhubungan	Supporting	Pengaturan lalu lintas dan keselamatan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Sesuai Standar (98,00%)	Memfaatkan infrastruktur PUPR
Dinas Perdagangan	Supporting	Kelancaran distribusi barang	Program Pengembangan Pasar		Dampak ekonomi dari jalan mantap
Dinas Koperasi & UMKM	Supporting	Akses UMKM ke pasar	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM terfasilitasi (9,00%)	Aksesibilitas berbasis infrastruktur

OPD	Peran dalam RPD	Bentuk Peran & Dukungan	Program/Kegiatan	Target	Nilai Crosscutting
Dinas Pariwisata	<i>Supporting</i>	Akses destinasi wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata (34,00%)

Diagram Grafis Crosscutting
Sasaran: Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi



Sasaran 2 Dinas PUPR Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi

OPD	Peran dalam RPD	Bentuk Peran & Dukungan	Program/Kegiatan	Indikator dan Target
Dinas PUPR	Core Sector	Pembangunan & rehabilitasi irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan panjang Irigasi Berfungsi Baik (0,92%)
Dinas TPH	Supporting	Produksi dan produktivitas	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian (4,30%)
Dinas Ketahanan Pangan	Supporting	Stabilitas pangan	Program Ketahanan Pangan	Ketersediaan layanan tanam
Dinas Lingkungan Hidup	Supporting	Perlindungan DAS	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA) (58.74 Point)
BPBD	Supporting	Mitigasi banjir/kekeringan	Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa tangguh dan persentase kejadian bencana ditangani (28.68% dan 100%)

Diagram Grafis Crosscutting
Sasaran: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman



Sasaran 3 Dinas PUPR Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman.

OPD	Peran dalam RPD	Bentuk Peran & Dukungan	Program/Kegiatan	Nilai Crosscutting
Dinas PUPR	Core Sector	Infrastruktur permukiman (air minum, sanitasi, drainase)	Program Cipta Karya & Perumahan	Infrastruktur dasar faktor kesejahteraan
Dinas Sosial	Supporting	Penanganan kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid (100%)
Dinas Kesehatan	Supporting	Kesehatan lingkungan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan masyarakat	Dampak sanitasi
Dinas PMD	Supporting	Penguatan desa	Program Pemberdayaan Desa	Pemanfaatan infrastruktur
Dukcapil	Supporting	Data kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kenaikan jumlah kerjasama pemanfaatan data kependudukan (80,00%)

Diagram Grafis Crosscutting Sasaran: Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW

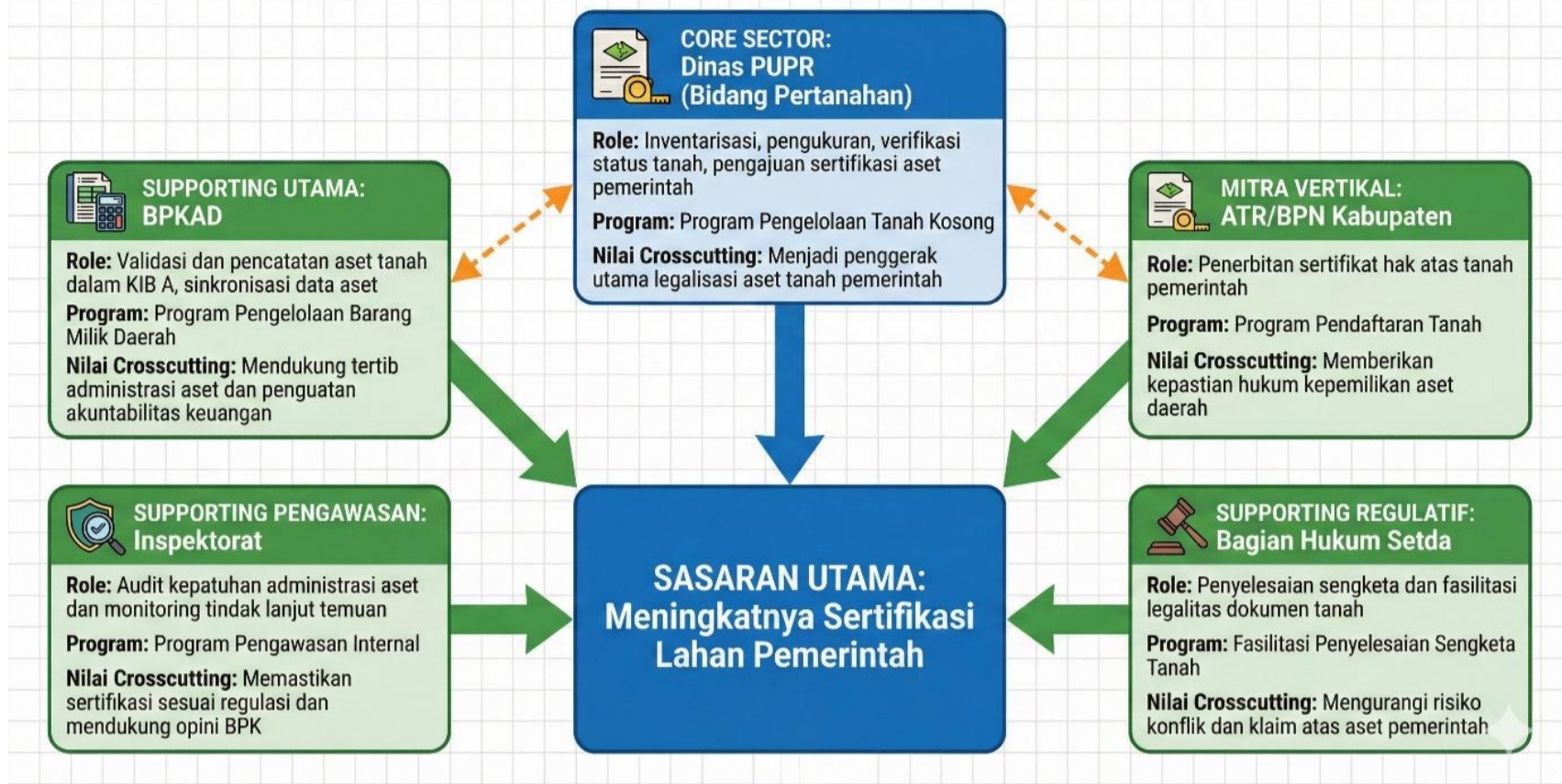


Sasaran 4 Dinas PUPR Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW.

OPD	Peran dalam RPD	Bentuk Peran & Dukungan	Program/Kegiatan	Nilai Crosscutting
Dinas PUPR	<i>Core Sector</i>	Penyusunan RDTR, pengendalian pemanfaatan ruang, rekomendasi kesesuaian tata ruang, pengawasan pelanggaran ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Output PUPR menjadi dasar legal seluruh aktivitas pembangunan dan investasi
DPMPTSP	<i>Supporting</i>	Penerbitan izin dan bangunan berbasis kesesuaian tata ruang	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kepastian ruang meningkatkan kualitas dan legalitas investasi
Dinas Lingkungan Hidup	<i>Supporting</i>	Pengendalian daya dukung lingkungan, AMDAL/UKL-UPL	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tata ruang mencegah kerusakan kawasan lindung dan meningkatkan

OPD	Peran dalam RPD	Bentuk Peran & Dukungan	Program/Kegiatan	Nilai Crosscutting
				kualitas lingkungan
Dinas Pertanian / TPH	<i>Supporting</i>	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mencegah alih fungsi lahan produktif, menjaga ketahanan pangan
BPKAD	<i>Supporting</i>	Sertifikasi dan penataan aset tanah pemerintah daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi aset dan mengurangi sengketa pertanahan
BPBD	<i>Supporting</i>	Identifikasi kawasan rawan bencana dalam dokumen tata ruang	Program Penanggulangan Bencana	Pengurangan risiko bencana berbasis zonasi tata ruang

Diagram Grafis Crosscutting Sasaran: Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah



Sasaran 5 Dinas PUPR Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah.

OPD	Peran dalam RPD	Bentuk Peran & Dukungan	Program/Kegiatan	Nilai Crosscutting
Dinas PUPR (Bidang Pertanahan)	<i>Core Sector</i>	Inventarisasi, pengukuran, verifikasi status tanah, pengajuan sertifikasi aset pemerintah	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Menjadi penggerak utama legalisasi aset tanah pemerintah
BPKAD	<i>Supporting Utama</i>	Validasi dan pencatatan aset tanah dalam KIB A, sinkronisasi data aset	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mendukung tertib administrasi aset dan penguatan akuntabilitas keuangan
ATR/BPN Kabupaten	<i>Mitra Vertikal</i>	Penerbitan sertifikat hak atas tanah pemerintah	Program Pendaftaran Tanah	Memberikan kepastian hukum kepemilikan aset daerah
Inspektorat	<i>Supporting Pengawasan</i>	Audit kepatuhan administrasi aset dan monitoring tindak lanjut temuan	Program Pengawasan Internal	Memastikan sertifikasi sesuai regulasi dan mendukung opini BPK

OPD	Peran dalam RPD	Bentuk Peran & Dukungan	Program/Kegiatan	Nilai Crosscutting
Bagian Hukum Setda	<i>Supporting Regulator</i>	Penyelesaian sengketa dan fasilitasi legalitas dokumen tanah	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Mengurangi risiko konflik dan klaim atas aset pemerintah

BAB V

TANTANGAN DAN PENGUATAN SINERGI LINTAS SEKTOR

4.1 Permasalahan dan Tantangan Lintas Sektor

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Kabupaten Lampung Barat memiliki karakteristik lintas sektor (*crosscutting*), dimana output program Dinas PUPR menjadi prasyarat bagi capaian kinerja perangkat daerah lainnya sebagaimana tergambar dalam analisis *crosscutting*. Dalam implementasinya, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan strategis yang mempengaruhi efektivitas sinergi antar perangkat daerah.

Pertama, belum optimalnya integrasi perencanaan berbasis *outcome* lintas OPD. Penyusunan program dan kegiatan masih cenderung sektoral, sehingga kontribusi terhadap sasaran RPD belum sepenuhnya terukur secara kuantitatif dalam indikator bersama. Hal ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih program, kurangnya fokus prioritas, serta belum maksimalnya dampak pembangunan terhadap indikator makro daerah.

Kedua, keterbatasan integrasi data dan sistem informasi infrastruktur. Data terkait jalan, irigasi, permukiman, tata ruang, dan pertanahan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu platform yang dapat dimanfaatkan bersama oleh perangkat daerah. Kondisi ini mempengaruhi akurasi perencanaan, ketepatan penganggaran, dan kualitas evaluasi kinerja.

Ketiga, tantangan geografis dan kebencanaan. Kabupaten Lampung Barat memiliki kondisi topografi berbukit dan rawan bencana, yang berdampak pada tingginya biaya pemeliharaan infrastruktur serta risiko gangguan terhadap pelayanan dasar. Tantangan ini memerlukan koordinasi yang lebih kuat antara Dinas PUPR, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat daerah teknis lainnya.

Keempat, keterbatasan kapasitas fiskal dan sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran mengharuskan adanya prioritasasi program berbasis manfaat lintas sektor (*multiplier effect*), sementara kebutuhan kompetensi teknis dalam perencanaan berbasis kinerja dan manajemen risiko masih perlu ditingkatkan.

Kelima, pengendalian pemanfaatan ruang dan legalitas aset daerah. Masih terdapat potensi konflik pemanfaatan ruang serta belum tertibnya administrasi pertanahan pemerintah daerah, yang memerlukan koordinasi erat antara Dinas PUPR, BPKAD, DPMPTSP, Bagian Hukum, serta ATR/BPN.

4.2 Penguatan Sinergi dan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor secara terstruktur dan berkelanjutan.

1. Penguatan Perencanaan Terintegrasi dan *Cascading* Kinerja
Perlu dilakukan penyelarasan indikator sasaran antar perangkat daerah melalui forum koordinasi perencanaan dan penganggaran (RKPD dan KUA-PPAS), sehingga setiap program memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran RPD. Penyusunan pohon kinerja lintas OPD menjadi instrumen penting untuk memastikan kontribusi Dinas PUPR terhadap sasaran pembangunan dapat ditelusuri secara jelas dan terukur.
2. Integrasi Sistem Informasi dan Basis Data Infrastruktur
Pengembangan sistem informasi infrastruktur terpadu berbasis GIS kinerja akan meningkatkan transparansi, akurasi data, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi lintas sektor. Sistem ini juga dapat mendukung kebutuhan *evidence-based performance* dalam evaluasi APIP dan peningkatan nilai SAKIP.
3. Penguatan Koordinasi Teknis dan Forum Tematik
Pembentukan forum koordinasi tematik (misalnya forum ketahanan pangan, forum pengurangan kawasan kumuh, forum pengendalian tata ruang) akan memperjelas peran masing-masing perangkat daerah dan menghindari duplikasi program. Koordinasi ini perlu didukung dengan berita acara dan dokumen tindak lanjut sebagai bagian dari pengendalian internal.
4. Implementasi Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi
Setiap program strategis yang memiliki dampak lintas sektor perlu dilengkapi dengan pemetaan risiko, rencana mitigasi, dan indikator pengendalian. Integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan program akan memperkuat efektivitas pengawasan internal serta meminimalkan potensi temuan audit.
5. Prioritisasi Program Berbasis Dampak Lintas Sektor
Dalam kondisi keterbatasan fiskal, program dengan nilai *crosscutting* tinggi dan *multiplier effect* besar perlu diprioritaskan, seperti peningkatan jalan akses produksi, rehabilitasi jaringan irigasi prioritas, penanganan kawasan kumuh, serta percepatan sertifikasi aset daerah.

4.2 Arah Penguatan Tata Kelola Lintas Sektor

Penguatan sinergi lintas sektor tidak hanya memerlukan koordinasi administratif, tetapi juga transformasi tata kelola kinerja yang berorientasi pada hasil. Dinas PUPR perlu memastikan bahwa setiap output infrastruktur memiliki indikator dampak yang terukur terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan penguatan koordinasi, integrasi data, manajemen risiko, serta evaluasi berbasis *outcome*, diharapkan pelaksanaan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan daerah.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis *crosscutting* kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026, dapat ditegaskan bahwa Dinas PUPR memiliki posisi strategis sebagai *Core Sector* dalam mendukung pencapaian sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2026

Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menghasilkan output fisik infrastruktur, tetapi secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi capaian *outcome* perangkat daerah lain, khususnya pada aspek konektivitas wilayah, ketahanan pangan, kualitas permukiman, pengendalian tata ruang, dan tertib administrasi aset daerah.

Secara akuntabilitas kinerja, keterkaitan (*crosscutting*) antar perangkat daerah telah menunjukkan hubungan logis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan kontribusi terhadap sasaran pembangunan daerah. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam aspek penyelarasan indikator kinerja lintas sektor, konsistensi *Cascading* kinerja dari level RPD ke Renstra dan Renja, serta pengukuran kontribusi *outcome* terhadap indikator pembangunan daerah secara kuantitatif. Dari perspektif pengawasan internal, efektivitas pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan berbasis data, kecukupan pengendalian internal, serta mekanisme monitoring dan evaluasi terpadu yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara komprehensif dalam satu sistem kinerja terintegrasi.

Dengan demikian, secara umum Dinas PUPR telah menjalankan fungsi strategisnya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, namun masih diperlukan langkah-langkah penguatan tata kelola kinerja agar selaras dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Liwa, Februari 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,


MIA MIRANDA, S.T
Pembina Tk.I
NIP. 19720905 200212 2 004